

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kekerasan atas nama agama seperti kasus pembakaran rumah ibadat, perusakan rumah ibadat, pelarangan untuk beribadat dan diskriminasi terhadap kaum minoritas adalah contoh konkrit penolakan terhadap kemajemukan. Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, ras dan agama. Pluralitas bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan negara lain. Namun dalam menyatukan kemajemukan yang ada, berbagai persoalan sosial justru dihadapi masyarakat Indonesia. Pada tataran ini, kemajemukan di satu sisi dipandang sebagai suatu kekayaan yang harus dijaga dan dihayati agar tetap eksis. Karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk konkrit dalam menjaga kemajemukan yang ada. Misalnya, para pendiri bangsa (*founding fathers*) merumuskan arah dasar bernegara dan berbangsa dengan meletakkan pluralitas sebagai titik berangkat refleksi dan dasar pemikiran Pancasila. Pada prinsipnya, tidak ada entitas etnis, agama, maupun kultur yang dominan dalam bangunan bangsa Indonesia. Dengan demikian, semua orang memiliki posisi yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara ada kelompok-kelompok tertentu yang justru bersikap eksklusif. Sikap tersebut dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang menjadi motif terjadinya konflik. Dalih-dalih kelompok radikal terus mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum dan menolak keyakinan agama lain. Persoalan seperti ini harus diberantas dan dilenyapkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan kekerasan dalam sebuah negara yang plural, khususnya pluralitas agama seperti Indonesia, menegaskan bahwa toleransi beragama harus dijunjung tinggi. Ini dikarenakan toleransi beragama selalu menampilkan sikap positif yakni keterbukaan yang mencakup sikap dan semangat hidup dalam

kebersamaan dan perjumpaan dengan agama lain. Dialog interreligius menjadi fondasi penting dalam memberikan pemahaman yang rasional tentang agama anti kekerasan. Pada dasarnya setiap agama tidak menginginkan adanya kekerasan dalam kehidupan beragama, sehingga segala bentuk kekerasan harus ditolak dan dilenyapkan. Kekerasan lazim disebut sebagai bentuk persekusi dan intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu yang membuatnya merasa dirugikan. Dalam kehidupan beragama berbagai bentuk intimidasi tersebut, misalnya pembakaran rumah ibadah, memprovokasi keyakinan tertentu, menyerang agama minoritas, dan lain sebagainya. Beberapa contoh tersebut menunjukkan peta suram kehidupan beragama di Indonesia yang telah merusak keberagaman yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, tetapi upaya tersebut tidak membendung pelbagai kekerasan yang ada di Indonesia. Dalih-dalih kelompok radikal tetap ada dan terus mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum dan menolak keyakinan agama lain. Akibatnya, berbagai kekerasan telah terjadi dan hal itu menjadi momok menakutkan bagi bangsa Indonesia. Namun, kekerasan atas nama agama harus diberantas dan dilenyapkan dengan merevitalisasi hubungan antar-agama di Indonesia. Karena itu, dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis agama harus adanya kerja sama semua elemen bangsa.

Menjalinkan kerja sama antar-pemeluk agama selalu menjadi sumbangsih positif dalam kehidupan beragama. Dengan adanya kerja sama antarumat beragama, cita-cita bangsa untuk hidup rukun, damai dan toleran dapat tercapai. Toleransi umat beragama bukan hanya sebatas konsep atau ide belaka, melainkan diwujudkan dalam praktek kehidupan masyarakat. Setiap penganut agama wajib menerima sesamanya yang berbeda keyakinan untuk saling mencintai tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Menyadari dan mengakui keyakinan agama lain menjadi pintu masuk untuk melakukan kerja sama dalam berbagai persoalan kemanusiaan yang dialami oleh agama mana pun. Karena itu, merevitalisasi hubungan antar-agama menjadi salah satu opsi solutif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan meredam eksploitasi terhadap umat beragama. Pola hubungan itu dapat dilihat dalam hubungan agama Islam dan Katolik di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Namun realitas kemajukan itu tidak menghalangi pertumbuhan toleransi di tengah masyarakat. Sebaliknya, masyarakat NTT justru menjadikan perbedaan itu sebagai tolok ukur menyatukan masyarakat. Antusiasme masyarakat NTT dalam menerima perbedaan begitu nampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal itu terbukti melalui berbagai kegiatan gotong royong yang melibatkan umat dari berbagai agama. Kerja sama antarumat beragama dalam membangun rumah ibadat, melestarikan budaya dan menjaga keberagaman yang ada telah menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Aktualisasi ini semakin nyata dalam hubungan agama Islam dan Katolik yang berada di provinsi NTT. Islam sebagai sebuah agama selalu mengajarkan kepada penganut agama untuk selalu menghormati sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran agama Islam. Karena itu, fakta telah membuktikan bahwa Islam merupakan sebuah agama yang selalu mengajarkan toleransi terhadap semua agama. Hal yang sama juga telah ditunjukkan melalui praktek kehidupan beragama umat Kristiani. Konsili Vatikan II telah menandai suatu era baru dalam Gereja yang semakin dialogal dan terbuka terhadap agama-agama dunia, khususnya Islam. Karena itu, baik agama Islam maupun agama Katolik sama-sama memiliki komitmen untuk tetap memperjuangkan kerukunan dalam kehidupan beragama. Kerukunan itu dapat tercapai hanya melalui suatu proses dialog untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu ruang. Namun, dalam proses dialog sikap keterbukaan dan saling menerima harus dikedepankan demi tercapainya sifat agama yang dialogal dan terbuka.

5.2 USUL DAN SARAN

5.2.1 Bagi Masyarakat Beragama

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki keberagaman agama. Namun, pluralitas agama yang ada justru menimbulkan ambivalensi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di satu sisi, pluralitas agama menjadi suatu kekayaan bangsa yang harus dirawat dan dilestarikan. Namun di sisi lain, pluralitas agama justru menimbulkan berbagai perpecahan dalam kehidupan

bangsa Indonesia. Agama kerap dijadikan sebagai basis untuk melegitimasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sosio-politik, dan lain sebagainya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa agama menjadi sumber kekerasan. Kekerasan dalam kehidupan beragama adalah salah satu fakta yang tidak terbantahkan dalam sebuah bangsa yang multireligius. Berbagai bentuk kekerasan itu disebabkan karena adanya klaim kebenaran yang absolut dari masing-masing agama. Bahkan atas dasar klaim tersebut penganut agama berhak menentukan hukum yang harus dijalani oleh masyarakat. Corak pemikiran seperti ini justru menimbulkan adanya gesekan-gesekan sosial yang tidak jarang disertai kekerasan. Jika ajaran keagamaan yang eksklusif ini terus berkembang, maka kekerasan berbasis agama tidak akan terbendung, sehingga dapat menghancurkan keberagaman agama di Indonesia.

Dalam mengatasi persoalan seperti ini dibutuhkan opsi solutif yang tepat dan menyentuh akar persoalan kekerasan berbasis agama. Opsi solutif itu, misalnya melakukan dialog antarumat beragama dengan mengedepankan sikap keterbukaan dan saling menerima terhadap berbagai perbedaan. Dialog antarumat beragama bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis agama yang mencoba memisahkan keutuhan bangsa Indonesia. Dialog antarumat beragama dapat memberikan dampak positif bagi para penganut agama dalam menciptakan pemahaman yang mendalam tentang keyakinan-keyakinan agama lain. Dengan memiliki wawasan yang luas tentang agama lain, maka segala bentuk kekerasan dapat dicegah dan diminimalisasikan. Tentu yang paling penting di sini adalah sikap keterbukaan dalam mengakui keberadaan agama lain dan membiarkan keyakinan-keyakinan itu tetap eksis. Karena itu, keberagaman agama dapat memberikan sumbangsih positif bagi bangsa Indonesia dengan menciptakan kerukunan, kedamaian dan toleransi. Kerukunan umat beragama hendaknya dijadikan sebagai fondasi dalam merawat dan menjaga keberagaman agama yang ada.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Kekerasan atas nama agama adalah suatu situasi yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab

memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis agama. Tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan semua elemen masyarakat. Semua orang memiliki tanggung jawab terhadap persoalan sosial, sehingga setiap elemen berkewajiban untuk terlibat aktif dalam memerangi kekerasan (agama). Karena itu, keterlibatan semua pihak dalam membangun kerja sama dapat berdampak positif dalam meminimalisir berbagai kekerasan. Dalam menangkal kekerasan berbasis agama, setidaknya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah. *Pertama*, pemerintah berkewajiban untuk menghimpun semua masyarakat sebagai satu bangsa dan memberikan hak yang sama sebagai warga negara. Salah satu faktor penyebab muncul kekerasan berbasis agama adalah karena adanya ketidakadilan dalam memberikan hak kepada warga negara. Artinya, ada kelompok tertentu yang diberikan hak istimewa dalam kehidupan berbangsa, sehingga menimbulkan iri hati dari kelompok-kelompok lain yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Karena itu, untuk menghindari persoalan seperti ini, pemerintah harus memperhatikan setiap warga dan memberikan hak yang sama tanpa membedakan suku, agama dan rasnya.

Kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi setiap warganya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, pemerintah hendaknya melindungi setiap warganya dari berbagai bentuk persekusi yang merusak integrasi bangsa. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi warga dari pelbagai persoalan dengan menetapkan berbagai aturan sebagai perwujudan perlindungan terhadap warga negara. *Ketiga*, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi warganya dari berbagai bentuk persekusi dan intimidasi yang merujuk pada kekerasan bernuansa agama. *Keempat*, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kebebasan kepada warganya dalam kehidupan beragama. Dengan adanya kebebasan, khususnya kebebasan dalam kehidupan beragama, setiap warga memiliki hak untuk menentukan agamanya dan menjalankan ritual menurut keyakinannya masing-masing. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk

melindungi setiap warganya dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat merusak keberagaman yang ada.

Oleh karena itu, segala bentuk persekusi dan intimidasi yang merujuk pada kekerasan bernuansa agama harus dicegah dan dihindari oleh negara. Toleransi beragama dapat dijadikan sebagai landasan dasar dalam menolak pelbagai bentuk kekerasan dalam kehidupan bergama. Dengan merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara, pemerintah harus menghimpun seluruh masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa tanpa saling mengintimidasi satu sama lain. Rasa persaudaraan itu dirumus secara padat dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dan mengindikasikan bahwa tidak ada entitas etnis, agama, maupun kultur yang dominan dalam bangunan bangsa Indonesia.

5.2.3 Bagi Pemimpin Agama

Pemimpin agama merupakan salah satu tokoh penting dalam mengarahkan masyarakat untuk tetap hidup secara toleran dan damai dalam kehidupan beragama. Karena itu, peran pemimpin agama dalam struktur hirarkis dan dalam membangun kehidupan beragama yang damai sangat urgen. Pemimpin agama hendaknya menjadi panutan bagi masyarakat dalam meluruskan nilai dan ajaran agamanya serta mewujudkan cita-cita agamanya. Karena itu, pemimpin agama hendaknya menampilkan sikap kepemimpinan kepada masyarakat melalui cara-cara hidup praktis. Pemimpin agama mendorong para penganut agama untuk tetap hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Akan tetapi hal itu tidak akan tercapai tanpa figur yang dapat mengakomodasi berbagai teladan hidup. Karena itu, sebagai figur penting dalam setiap agama, tokoh agama harus menunjukkan sikap dan prinsip hidup yang toleran, inklusif dan mau menerima keyakinan-keyakinan lain. Hal ini juga yang menjadi tugas dari setiap pemimpin agama, seperti meluruskan pemahaman tentang nilai dan ajaran masing-masing agama, memecahkan kebuntuan dalam dialog lintas agama, menciptakan kerukunan antarumat beragama dengan bersikap terbuka dan menerima perbedaan serta menyelesaikan berbagai konflik entah itu konflik internal agama maupun konflik eksternal.

Selain sebagai teladan hidup yang baik kepada masyarakat, pemimpin agama juga hendaknya terlibat aktif dalam memperjuangkan berbagai kerukunan antarumat beragama. Pada tataran ini, tokoh agama dapat memfasilitasi para penganut agama dalam melakukan berbagai dialog. Dialog tersebut tidak hanya terbatas pada dialog internal agama, tetapi juga melakukan dialog eksternal agama. Pentingnya suatu dialog dalam kehidupan beragama menuntut pemimpin agama untuk tetap menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, sehingga berbagai upaya dalam menciptakan kerukunan umat beragama dapat terorganisir. Karena itu, tokoh agama memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan intoleransi yang menimbulkan gesekan-gesekan sosial dan disertai kekerasan. Perlu diketahui bahwa persoalan intoleransi di Indonesia terjadi karena perbedaan keyakinan, dikotomi mayoritas dan minoritas serta berbagai bentuk kejahatan lainnya, sehingga adanya presensi kekerasan berbasis agama. Dalam mengatasi persoalan ini, kehadiran pemimpin agama hendaknya menjadi tokoh penting dalam memecahkan kebuntuan dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. Karena itu, kebijaksanaan pemimpin agama sangat diharapkan dalam mendorong terciptanya agama yang damai, rukun dan toleran. Hal ini juga dipertajam oleh pengetahuan yang memadai dari pemimpin agama dalam memahami berbagai ajaran agama yang ada.

5.2.4 Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian masyarakat beragama. Dengan adanya lembaga pendidikan diharapkan para penganut agama dapat menimba pengetahuan tentang agamanya dan agama dari penganut lain, sehingga tidak saling mencurigai dan mengklaim kebenaran ajaran masing-masing agama. Namun, pendidikan agama dalam tiap bentuknya dapat dijadikan sebagai alasan untuk memprovokasi dan mengintimidasi kelompok agama tertentu. Di sini, pemeluk agama terjerat dalam pemahaman yang dangkal tentang agama lain yang disebabkan karena adanya penggunaan pengetahuan yang tidak bijak. Di Indonesia lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pribadi yang religius dan inklusif. Dalam hal ini pendidikan agama yang berperan penting dalam menciptakan generasi yang religius dan demokrat. Pendidikan keagamaan yang

benar dan berasaskan hukum di Indonesia akan membentuk kepribadian yang toleran, sedangkan pendidikan keagamaan yang keliru dan salah justru akan membentuk pribadi yang fanatik dan terjerat dalam paham radikal.

Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mentransferkan pengetahuan kepada manusia. Sebagai tempat memberikan pengetahuan kepada manusia, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menangkal berbagai kekerasan dalam kehidupan masyarakat, termasuk kekerasan berbasis agama. Pada tataran ini yang ditransfer adalah pengetahuan tentang nilai dan karakter setiap manusia. Dengan membentuk karakter manusia melalui pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia, masyarakat dapat mempraktikkan nilai itu dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pengamalan nilai-nilai tersebut juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan bergama.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS, ENSIKLOPEDIA DAN DOKUMEN

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jilid I. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawirayana. Cetakan XIV. Jakarta: Obor, 2019.
- Pei, Mario. *The Lexicon Webster Dictionary. Volume II*. America: The English-Language Institute of America inc, 1971.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*. Bab XI, Pasal 29 ayat 2.
- Taliaferro, Charles dan Elsa J. Marty, ed. *A Dictionary of Philosophy of Religion*. New York: The Continuum International Publishing Group, 2010.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Aditya, 1991.
- Verhoeven, Th. L. dan Marcus Carvallo. *Kamus Latin Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.
- Wiradi, Gunawan. “Kekerasan”, dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 8. Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.

II. BUKU-BUKU

- Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Baghi, Felix. *Alteritas, Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Bhagi, Silvano Keo. *Negara Bukan-Bukan? Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi antara Agama dan Negara*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Daven, Mathias. “Klaim Kebenaran dan Toleransi dalam Konteks Hubungan Antara Islam dan Kekristenan di Indonesia”, dalam Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung, ed. *Menalar Keadilan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.

- “Politik atas Nama Allah”, dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger, ed. *Hidup sebuah Pertanyaan: Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Dja’ar, Alamsyah M. *Intoleransi! Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2018.
- Fachrian, Muhammad Rifqi. *Toleransi Antarumat Beragama dalam Al-Qur’an (Telaah Konsep Pendidikan Islam)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Gunawan, Budi dan Barito Mulyo Ratmono. *Kebohongan di Dunia Maya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- Jainuri, Achmad. *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia*. Bandung: Yrama Widya, 2017.
- Kleden, Paulus Budi. *Dialog Antaragama dalam Terang Filsafat Proses Alfred North Whitehead*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Laku, Sylvester Kanisius. “Pendahuluan”, dalam Dwikokratno dan Lani ed. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Muhammad, K. H. Husein. *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan, Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Nurcholish, Ahmad. *Kristen Bertanya Muslim Menjawab*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2020.
- dan Alamsyah M. Dja’far, *Agama Cinta: Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Panda, Herman P. *Agama-Agama dan Dialog Antar-Agama dalam Pandangan Kristen*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Pureklolon, Thomas T. *Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Setiawan, Chandra dan Asep Mulyana. *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Siagian, B.D.O. *Ancaman Nyata Radikalisme Melalui Dunia Maya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Suadi, H. Amran. *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi [Nilai-Nilai Moderasi Beragama]*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.

- Tibi, Bassam. *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Terj. Misbah Zulfa Ellisabet dan Zainul Abas. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Tule, Philipus. *Mengenal dan Mencinta Muslim dan Muslimat Penuntun Bagi Para Pembaca Non-Muslim*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- “Membangun Format Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Menurut Pandangan Katolik”. Dalam Philipus Tule dan Maria Matildis Banda, ed. *Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di NTT*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.
- “Prolog: Ikhtiar Mengungkap Identitas Muslim Pribumi di NTT”. Dalam Philipus Tule, Fredrik Doeka dan Ahmad Atang (ed.), *Wacana Identitas Muslim Pribumi NTT*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Watt, W. Montgomery dan R. Bell. *Introduction to Al’Quran*. Edinbrugh: Edinbrugh University Press, 1990.
- Wattimena, Reza A. A. *Untuk Semua yang Beragama: Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik, dan Spiritualitas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Windhu, I Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

III. ARTIKEL DAN JURNAL

- Azra, Azyumardy. “Cultural Pluralism in Indonesia: Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local, National and Global Contexts”. *Asia Pacific Journal on Religion and Society*, 2:2, November 2018.
- Bagir, Zainal Abidin. “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, dalam Ihsan Ali-Fauzi, dkk, ed. *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017.
- Basuki, Markus. “Persaudaraan Sejati Antarpemeluk Agama: Mengapa Sulit Terwujud?”. Dalam Hipolitus Kristoforus Kewuel (ed.), *Mengolah Pluralitas Agama*. Yogyakarta: Penerbit Serva Minora, 2011.
- Binsasi, Eusebius. “Kebebasan Beragama: Menuju NTT yang Rukun Mengharum”. Dalam Philipus Tule, Fredrik Doeka dan Ahmad Atang (ed.), *Wacana Identitas Muslim Pribumi NTT*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Damanik, Jayadi. “Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Ketertiban Umum dalam Kasus GKI Yasmin Bogor”. *Jurnal HAM*, 9:2, Desember 2018.
- Diah, Halimutasa. “Dari Prasangka Hingga Diskriminasi”. *Jurnal Avant Garde*, 5:1, Juni 2017.

- Gani, Ramlan Abdul. "Toleransi Menurut Al-Qur'an dan Hadits". *Jurnal Al Ashriyyah*, 6:2, Oktober 2020.
- Isnaeni, Ahmad. "Kekerasan Atas Nama Agama". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 8:2, Desember 2014.
- Kewuel, Hipolitus Kristoforus. "Pemikiran John David Coputo tentang Agama", dalam Hipolitus Kristoforus Kewuel, ed. *Mengolah Pluralitas Agama*. Yogyakarta: Penerbit Serva Minora, 2011.
- Mathar, M. Qasim. "Kebebasan Bersama dan Berkepercayaan: Beberapa Catatan dari Perspektif Islam", dalam Candra Setiawan dan Asep Mulyana, ed. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006.
- Mulia, Siti Musdah. "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia", dalam Ahmad Syafii Maarif, ed. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralitas Kita*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, 2010.
- Misbah, M. "Agama dan Alienasi Manusia (Refleksi Atas Kritik Karl Marx Terhadap Agama)". *Jurnal Komunika*, 9:2, Juli-Desember 2015.
- Muktafi, dan Ahmad Zainul Hamdi. "Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antariman", dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, ed. *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Raho, Bernard Mathias Daven, dan Hendrikus Maku. "Benih-Benih Ideologi Islamisme Radikal di Kalangan Sejumlah Mahasiswa NTT". *Jurnal Ledalero*, 19:1, Juni 2020.
- Syafaq, Hammis. "Pluralisme dan Perspektif Al-Quran dalam Menjaga Kebhinekaan", dalam Ahmad Zainul Hamdi Muktafi, ed. *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Sindhunata. "Kata Pengantar". dalam Charles Kimbal, *Kala Agama Jadi Bencana*. Nurhadi (Penerj). Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Kurnia, Yuangga Y. "Fenomena Kekerasan Bermotif Agama di Indonesia". *Jurnal Kalimah*, 15:2, September 2017.

IV. SKRIPSI, DISERTASI DAN BAHAN SEMINAR

- Ach, Tahir dan M. Abdul Karim. "*Sejarah Gerakan Wahabi di Dunia Arab dan Penyebarannya di Indonesia*". Disertasi Doktoral, Universitas Gadjah Mada, 2010.

- Driessen, Michael. "Religious Democracy and Civilizational Politics: Comparing Political Islam and Political Catholicism". *CIRS Occasional Papers*, Georgetown University, 2013.
- Juang, Dionisius. "Toleransi Beragama: Sebuah Upaya Untuk Memerangi Kekerasan Antarumat Beragama di Indonesia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2017.
- Nonci, Virgilius Sumantri. "Pentingnya Revitalisasi Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

V. INTERNET

- Abadi, Alfian Putra. "Setara Institute sebut 10 Kampus Terpapar Paham Radikalisme". *Tirto.id* 12 November 2022, <<http://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>>, diakses pada 15 Januari 2023.
- Aivanni, Nur. "Penegak Hukum Terhadap Aksi Intoleransi Masih Lemah". *Media Indonesia* 12 September 2022, <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/104813/penegakan-hukum-terhadap-aksi-intoleransi-masih-lemah>>, diakses pada 12 September 2022.
- Ferdinan. "Sebut Syiah Bukan Islam, Menteri Agama Dikecam". *News Okezone* 28 Januari 2012, <<http://news.okezone.com/read/2012/01/28/339/565063/sebut-syiah-bukan-islam-menteri-agama-dikecam>>, diakses pada 29 September 2022.
- Kaffah, Islam. "Wahid Foundation: Salah Satu Faktor Utama Intoleransi Adalah Perasaan Terpinggirkan", *Islam Kaffah* 8 Oktober 2022, <<http://islamkaffah.id/wahid-foundation-salah-satu-faktor-utama-intoleransi-adalah-perasaan-terpinggirkan/>>, diakses pada 10 Oktober 2022.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. "NTT Raih Indeks Kerukunan Umat Beragama Tertinggi Tahun 2021", dalam *Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi NTT*, <http://ntt.kemenag.go.id/berita/518067/ntt-raih-indeks-kerukunan-umat-beragama-tertinggi-tahun-2021>, diakses pada 25 Maret 2022.
- Kuwado, Fabian Januarius. "Bermacam Hal yang Perlu Diketahui Soal Edaran Kapolri tentang Hate Speech", *Nasional Kompas* 30 Oktober 2022, <<https://nasional.kompas.com/read/2015/10/30/06060001/bermacam.hal.yang.perlu.diketahui.soal.edaran.kapolri.tentang.hate.speech>>, diakses pada 11 Oktober 2022.
- Madjid, Susmiyati. "Riuh Isu Deradikalisasi di Lembaga Pendidikan, Islam sebagai Sasaran". *Terbitkan Buku Gratis* 9 September 2022, <<https://terbitkan.bukugratis.id/susmiyati-madjid/09/2022/riuh-isu>>

deradikalisasi- di- lembaga- pendidikan- islam- sebagai-sasaran/>, diakses pada 9 September 2022.

Safenet Voice. “Ringkasan Laporan Riset Ujaran Kebencian di Ranah Digital”, *Safenet* 10 Januari 2022, <<https://id.safenet.or.id/2022/01/laporan-riset-ujaran-kebencian/>>, diakses pada 11 Oktober 2022.

Tahmid, KH Khairudin. “Perilaku Eksklusif Menjadi Indikator Aliran Agama yang Melenceng”. *Nu* 7 September 2022, <[http://www.nu.or.id/daerah/perilaku-eksklusif-jadi-indikator-aliran-agama-yang-melenceng-vGtsB-\(nu.or.id\)](http://www.nu.or.id/daerah/perilaku-eksklusif-jadi-indikator-aliran-agama-yang-melenceng-vGtsB-(nu.or.id))>, diakses pada 7 September 2022.

Wardah, Fathiyah. “Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia”. *setara Institute for Democracy and Peace* 10 Oktober 2022, <<http://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>>, diakses pada 10 Oktober 2022.